



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 48 TAHUN 2024

**TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2024**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko yang berisi pelaksanaan kegiatan pengawas internal yang dilakukan oleh Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 898);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan panduan bagi Inspektorat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri atas:

- a. Peta Risiko Unit Organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- b. Faktor Risiko Unit Organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Daftar Profil Risiko Auditi/Klien berdasarkan hasil perhitungan Risiko Komposit dari Peta Risiko dan Faktor Risiko Unit Organisasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- d. Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 397 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2024
KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia,



Suharti

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS
RISIKO INSPEKTORAT LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN 2024
NOMOR : 48 TAHUN 2024
TANGGAL : 1 Februari 2024

**PETA RISIKO UNIT ORGANISASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No	Area Pengawasan <i>(diurutkan berdasarkan nilai PR)</i>	Peta Risiko (PR)			
		Komposit Risiko	Bobot	Nilai PR	
1	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan	9	Tinggi	50%	4,5
2	Direktorat Pasar Digital Pengadaan	9	Tinggi	50%	4,5
3	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	9	Tinggi	50%	4,5
4	Biro Perencanaan dan Keuangan	9	Tinggi	50%	4,5
5	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	9	Tinggi	50%	4,5
6	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	6	Sedang	50%	3,0
7	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	6	Sedang	50%	3,0
8	Direktorat Sistem Pengadaan Digital	6	Sedang	50%	3,0
9	Pusat Data dan Informasi	6	Sedang	50%	3,0
10	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	4	Sedang	50%	2,0
11	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat	4	Sedang	50%	2,0
12	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	4	Sedang	50%	2,0
13	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	4	Sedang	50%	2,0
14	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	4	Sedang	50%	2,0
15	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	4	Sedang	50%	2,0
16	Inspektorat	4	Sedang	50%	2,0
17	Direktorat Sertifikasi Profesi	3	Rendah	50%	1,5

Catatan: Data Peta Risiko diambil berdasarkan data analisis risiko yang dilakukan oleh unit organisasi pada Semester II Tahun 2022 dan pada Semester I Tahun 2023

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG
PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN 2024

NOMOR : 48 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 Februari 2024

**PENILAIAN 8 FAKTOR RISIKO UNIT ORGANISASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No	Unit Organisasi	(1) Pagu Anggaran		(2) Anggaran Pengadaan Barang/Jasa		(3) Jumlah Layanan		(4) Rekomendasi Tindak Lanjut atas Hasil Audit BPK		(5) Jumlah Kerjasama dengan Pihak Ketiga		(6) Jumlah Keterlibatan Permasalahan Hukum		(7) Jumlah Kegiatan Pengawasan Internal		(8) Persentase Penyerapan Anggaran Eselon II	
		Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor
1	Direktorat Pasar Digital Pengadaan	Sangat Tinggi	5	Sangat Tinggi	5	Rendah	2	Sangat Tinggi	5	Sangat Tinggi	5	Sangat Tinggi	5	Sedang	3	Sedang	3
2	Direktorat Sistem Pengadaan Digital	Tinggi	4	Sangat Tinggi	5	Sangat Rendah	1	Sedang	3	Sangat Tinggi	5	Rendah	2	Tinggi	4	Sedang	3
3	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Sangat Tinggi	5	Sangat Tinggi	5	Rendah	2	Sangat Tinggi	5	Rendah	2	Rendah	2	Sangat Rendah	1	Tinggi	4
4	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	Sangat Tinggi	5	Sangat Tinggi	5	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Tinggi	5	Sangat Rendah	1	Sangat Tinggi	5	Sedang	3
5	Pusat Data dan Informasi	Sedang	3	Tinggi	4	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Tinggi	5	Sangat Rendah	1	Sangat Tinggi	5	Sangat Tinggi	5
6	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	Rendah	2	Rendah	2	Tinggi	4	Sangat Rendah	1	Sangat Tinggi	5	Rendah	2	Tinggi	4	Tinggi	4
7	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Sangat Tinggi	5	Sangat Tinggi	5	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Rendah	2	Sedang	3	Sedang	3	Sedang	3

No	Unit Organisasi	(1) Pagu Anggaran		(2) Anggaran Pengadaan Barang/Jasa		(3) Jumlah Layanan		(4) Rekomendasi Tindak Lanjut atas Hasil Audit BPK		(5) Jumlah Kerjasama dengan Pihak Ketiga		(6) Jumlah Keterlibatan Permasalahan Hukum		(7) Jumlah Kegiatan Pengawasan Internal		(8) Persentase Penyerapan Anggaran Eselon II	
		Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor
8	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	Rendah	2	Sedang	3	Sangat Rendah	1	Sangat Tinggi	5	Rendah	2	Sangat Rendah	1	Sangat Tinggi	5	Tinggi	4
9	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan	Rendah	2	Sedang	3	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Tinggi	5	Sangat Rendah	1	Sangat Tinggi	5	Sedang	3
10	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Rendah	2	Sedang	3	Sedang	3	Sangat Rendah	1	Rendah	2	Rendah	2	Sangat Tinggi	5	Sedang	3
11	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat	Rendah	2	Rendah	2	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Tinggi	5	Rendah	2	Sangat Tinggi	5	Sedang	3
12	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	Sedang	3	Tinggi	4	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Rendah	2	Sangat Rendah	1	Sangat Tinggi	5	Sedang	3
13	Direktorat Sertifikasi Profesi	Rendah	2	Rendah	2	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Tinggi	5	Sangat Rendah	1	Sangat Tinggi	5	Sedang	3
14	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	Rendah	2	Rendah	2	Sedang	3	Sangat Rendah	1	Rendah	2	Sangat Rendah	1	Tinggi	4	Tinggi	4
15	Biro Perencanaan dan Keuangan	Rendah	2	Sedang	3	Sangat Rendah	1	Sangat Tinggi	5	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sedang	3	Rendah	2
16	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Rendah	2	Rendah	2	Rendah	2	Sangat Rendah	1	Rendah	2	Rendah	2	Sangat Tinggi	5	Rendah	2
17	Inspektorat	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Rendah	2	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1	Sangat Rendah	1

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG
PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN 2024

NOMOR : 48 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 Februari 2024

**DAFTAR PROFIL RISIKO AUDITI/KLIEN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2024**

No	Area Pengawasan	Peta Risiko (PR)			Faktor Risiko (FR)			Nilai Total Profil Risiko	Peringkat
		Komposit Risiko	Bobot	Nilai PR	Jumlah 9 Faktor Risiko	Bobot	Nilai FR		
1	Direktorat Pasar Digital Pengadaan	9	50%	4,5	33	50%	16,5	21	1
2	Direktorat Sistem Pengadaan Digital	6	50%	3	27	50%	13,5	16,5	2
3	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	9	50%	4,5	23	50%	11,5	16	3
4	Pusat Data dan Informasi	6	50%	3	25	50%	12,5	15,5	4
5	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	4	50%	2	26	50%	13	15	5
6	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan	9	50%	4,5	21	50%	10,5	15	6
7	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	9	50%	4,5	21	50%	10,5	15	7

No	Area Pengawasan	Peta Risiko (PR)			Faktor Risiko (FR)			Nilai Total Profil Risiko	Peringkat
		Komposit Risiko	Bobot	Nilai PR	Jumlah 9 Faktor Risiko	Bobot	Nilai FR		
8	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	4	50%	2	26	50%	13	15	8
9	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	6	50%	3	23	50%	11,5	14,5	9
10	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	4	50%	2	24	50%	12	14	10
11	Biro Perencanaan dan Keuangan	9	50%	4,5	18	50%	9	13,5	11
12	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	6	50%	3	20	50%	10	13	12
13	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat	4	50%	2	21	50%	10,5	12,5	13
14	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	4	50%	2	19	50%	9,5	11,5	14
15	Direktorat Sertifikasi Profesi	3	50%	1,5	20	50%	10	11,5	15
16	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	4	50%	2	18	50%	9	11	16
17	Inspektorat	4	50%	2	9	50%	4,5	6,5	17

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN IV: KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG
PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN 2024

NOMOR : 48 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 Februari 2024

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT LKPP TAHUN 2024

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
1	Audit						
1.1	Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital dan Pusat Data dan Informasi	7	25	1	Maret	Laporan
1.2	Audit Kinerja atas Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa pada Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa	6	25	1	September	Laporan
1.3	Audit Kinerja atas Pelaksanaan Layanan Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	6	25	1	Maret	Laporan
1.4	Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital Dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital	6	25	1	Juli	Laporan
JUMLAH KEGIATAN AUDIT				100	4		

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
2	Reviu						
2.1	Reviu atas Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024	Sekretariat Utama	5	10	1	Februari	Laporan
2.2	Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024	Sekretariat Utama	5	10	1	April	Laporan
2.3	Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2024	Sekretariat Utama	5	10	1	Juli	Laporan
2.4	Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Alokatif Tahun Anggaran 2024	Sekretariat Utama	5	10	1	September	Laporan
2.5	Reviu atas DIPA LKPP Tahun Anggaran 2024	Sekretariat Utama	5	10	1	Januari	Laporan
2.6	Reviu atas DIPA LKPP Tahun Anggaran 2024	Sekretariat Utama	5	10	1	Mei	Laporan
2.7	Reviu atas DIPA LKPP Tahun Anggaran 2024	Sekretariat Utama	5	10	1	Juli	Laporan
2.8	Reviu atas Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2026	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	5	10	1	September	Laporan
2.9	Reviu atas Laporan Kinerja (LKJ) Unit Organisasi Eselon I dan II Mandiri LKPP Tahun 2023	Seluruh Unit Organisasi Eselon I dan II Mandiri	7	10	1	Januari	Laporan
2.10	Reviu atas Laporan Kinerja (LKJ) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023	Biro Perencanaan dan Keuangan	5	10	1	Februari	Laporan
2.11	Reviu atas Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) LKPP Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2023	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	6	10	1	Maret	Laporan
2.12	Reviu atas Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) LKPP Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2024	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	6	10	1	Juni	Laporan
2.13	Reviu atas Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) LKPP Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2024	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	6	10	1	September	Laporan
2.14	Reviu atas Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) LKPP Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2024	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	6	10	1	Desember	Laporan

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
2.15	Reviu atas Laporan Keuangan & Laporan Barang Milik Negara LKPP Tahun Anggaran 2023 (<i>Unaudited</i>)	Biro Perencanaan dan Keuangan dan Sekretariat Utama	7	20	1	Januari	Laporan
2.16	Reviu atas Laporan Keuangan & Laporan Barang Milik Negara LKPP Tahun Anggaran 2023 (<i>Audited</i>)	Biro Perencanaan dan Keuangan dan Sekretariat Utama	6	20	1	Mei	Laporan
2.17	Reviu atas Laporan Keuangan & Laporan Barang Milik Negara LKPP Semester I Tahun Anggaran 2024	Sekretariat Utama	6	20	1	Juli	Laporan
2.18	Reviu atas Laporan Keuangan & Laporan Barang Milik Negara LKPP Triwulan III Tahun Anggaran 2024	Sekretariat Utama	6	20	1	Oktober	Laporan
2.19	Reviu atas Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2023	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	5	10	1	Januari	Laporan
2.20	Reviu Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2023	Sekretariat Utama	5	10	1	Januari	Laporan
2.21	Reviu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Kerjasama PT Telkom Indonesia (Persero) TBK Dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan I Tahun 2024	Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital	5	10	1	Maret	Laporan
2.22	Reviu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Kerjasama PT Telkom Indonesia (Persero) TBK Dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan II Tahun 2024	Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital	5	10	1	Juni	Laporan
2.23	Reviu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Kerjasama PT Telkom Indonesia (Persero) TBK Dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan III Tahun 2024	Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital	5	10	1	September	Laporan
2.24	Reviu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Kerjasama PT Telkom Indonesia (Persero) TBK Dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan IV Tahun 2024	Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital	5	10	1	Desember	Laporan

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
2.25	Reviu atas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Sistem <i>Purchasing</i> Semester II Tahun Anggaran 2023	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	10	1	Januari	Laporan
2.26	Reviu atas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Sistem <i>Purchasing</i> Semester I Tahun Anggaran 2024	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	10	1	Juli	Laporan
2.27	Reviu atas Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dan Pelaksana Ujian PBJ	Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pusat Pelatihan SDM Pengadaan Barang/Jasa	6	20	1	Maret	Laporan
JUMLAH KEGIATAN REVIU				320	27		
3	Evaluasi						
3.1	Evaluasi atas Reformasi Birokrasi Tematik dan Reformasi Birokrasi General di Lingkungan LKPP Periode Triwulan I Tahun 2024	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	7	1	Maret	Laporan
3.2	Evaluasi atas Reformasi Birokrasi Tematik dan Reformasi Birokrasi General di Lingkungan LKPP Periode Triwulan II Tahun 2024	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	7	1	Juni	Laporan
3.3	Evaluasi atas Reformasi Birokrasi Tematik dan Reformasi Birokrasi General di Lingkungan LKPP Periode Triwulan III Tahun 2024	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	7	1	September	Laporan
3.4	Evaluasi atas Reformasi Birokrasi Tematik dan Reformasi Birokrasi General di Lingkungan LKPP Periode Triwulan IV Tahun 2024	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	7	1	Desember	Laporan
3.5	Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	5	20	1	Mei	Laporan
3.6	Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital	Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital	5	20	1	Mei	Laporan

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
3.7	Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	5	20	1	Mei	Laporan
3.8	Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa	5	20	1	Mei	Laporan
3.9	Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Sekretariat Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Sekretariat Utama	5	20	1	Mei	Laporan
3.10	Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Pusat Data dan Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pusat Data dan Informasi	5	20	1	Mei	Laporan
3.11	Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pusat Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	5	20	1	Mei	Laporan
3.12	Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Inspektorat	5	20	1	Mei	Laporan
JUMLAH KEGIATAN EVALUASI				188	12		
4	Pemantauan						
4.1	Pemantauan atas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi B12 Tahun 2024 di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah c.q. Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital	5	5	1	Januari	Laporan
4.2	Pemantauan atas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi B15 Tahun 2024 di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah c.q. Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital	5	5	1	April	Laporan
4.3	Pemantauan atas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi B18 Tahun 2024 di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah c.q. Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital	5	5	1	Juni	Laporan

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
4.4	Pemantauan atas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi B21 Tahun 2024 di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah c.q. Kedeputan Bidang Transformasi Pengadaan Digital	5	5	1	Oktober	Laporan
4.5	Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Semester I Tahun Anggaran 2024	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	10	1	Juni	Laporan
4.6	Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Semester II Tahun Anggaran 2024	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	10	1	Desember	Laporan
4.7	Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun Anggaran 2024	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	15	1	Juni	Laporan
4.8	Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun Anggaran 2024	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	15	1	November	Laporan
4.9	Pemantauan atas Penanganan Pengaduan berkadar Pengawasan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2023	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	5	1	Januari	Laporan
4.10	Pemantauan atas Penanganan Pengaduan berkadar Pengawasan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2024	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	5	1	April	Laporan
4.11	Pemantauan atas Penanganan Pengaduan berkadar Pengawasan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2024	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	5	1	Juli	Laporan
4.12	Pemantauan atas Penanganan Pengaduan berkadar Pengawasan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2024	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	5	1	Oktober	Laporan
4.13	Pemantauan atas Penanganan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2023	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	5	1	Januari	Laporan

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
4.14	Pemantauan atas Penanganan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2024	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	5	1	April	Laporan
4.15	Pemantauan atas Penanganan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2024	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	5	1	Juli	Laporan
4.16	Pemantauan atas Penanganan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2024	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	5	1	Oktober	Laporan
4.17	Pemantauan atas Pelaksanaan Kewajiban Penyampaian LHKAN Pejabat/Pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5	5	1	Maret	Laporan
JUMLAH KEGIATAN PEMANTAUAN				115	17		
5	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Lainnya / Konsultansi						
5.1	Tim Penilai Internal Unit Organisasi Zona Integritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	6	15	1	Mei	Laporan
5.2	Pendampingan atas Kegiatan Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan LKPP Tahun Anggaran 2023	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah c.q. Sekretariat Utama	5	60	1	Februari	Laporan
5.3	Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024	Inspektorat	5	20	1	Maret	Laporan
5.4	Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegritas di Lingkungan LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	6	15	1	April	Laporan
JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA / KONSULTANSI				110	4		

No	Jenis Pengawasan / Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Keluaran
6	Perencanaan Pengawasan Intern						
6.1	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Tahun Anggaran 2025	Inspektorat	5	20	1	November	Laporan
JUMLAH KEGIATAN PERENCANAAN PENGAWASAN INTERN				20	1		
JUMLAH KESELURUHAN				853	65		

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI